

## **Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Blitar**

**Septa Ameliasari\*, Imalatul Fitria, Siti Rofi'atus Sholekhah, Agus Eko Sujianto**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

\*Email: [septaamelia004@gmail.com](mailto:septaamelia004@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar pada periode 2010–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar dan Bank Indonesia. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda dengan serangkaian uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, auto korelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar. Secara parsial, inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, peningkatan penciptaan lapangan kerja, serta pengelolaan pengeluaran pemerintah yang lebih produktif menjadi kunci dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan belanja publik yang bersifat produktif, memperkuat sektor-sektor penyerap tenaga kerja, serta menjaga stabilitas harga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Inflasi, Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of inflation, unemployment rate, and government expenditure on economic growth in Blitar Regency during the 2010–2024 period. The study utilizes secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Blitar Regency and Bank Indonesia. Multiple linear regression with classical assumption tests normality, autocorrelation, heteroskedasticity, and multicollinearity is employed as the analytical method. The findings reveal that inflation, unemployment rate, and government expenditure simultaneously exert a significant influence on the economic growth of Blitar Regency. Partially, inflation and the unemployment rate negatively affect economic growth, while government expenditure has a positive and significant impact. These results highlight the importance of implementing effective policies aimed at maintaining price stability, reducing unemployment, and optimizing productive public spending to enhance regional economic performance. Local governments should prioritize development-oriented expenditures and strengthen job-creating sectors to ensure sustainable economic growth.*

**Keywords:** *Inflation, Unemployment Rate, Government Expenditure, Economic Growth*

### **A. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu metrik umum untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah karena mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa serta kesejahteraan masyarakat. Namun, perekonomian daerah tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor makroekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran

pemerintah yang secara keseluruhan menentukan arah serta kestabilan pertumbuhan suatu wilayah (Mankiw, 2020). Di Kabupaten Blitar, salah satu kabupaten di Jawa Timur, laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2010–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, terutama ketika pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan kontraksi sebesar  $-2,48\%$ , menjadi titik terendah dalam lima tahun terakhir. Sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil menengah mengalami penurunan aktivitas akibat melemahnya daya beli serta terbatasnya kegiatan produksi. Setelah memasuki masa pemulihan, PDRB Kabupaten Blitar kembali tumbuh  $3,67\%$  pada 2022, meningkat menjadi  $4,12\%$  pada 2023, dan diproyeksikan menguat pada 2024 menurut BPS. Ketidakkonsistenan angka tersebut menampilkkan adanya gap fenomena yang memerlukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu kinerja ekonomi daerah.

Sejumlah variabel diketahui memengaruhi ekspansi ekonomi, antara lain inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya beli masyarakat sehingga menghambat aktivitas ekonomi (Samuelson & Nordhaus, 2021), sedangkan inflasi yang terkendali menciptakan iklim investasi yang stabil dan mendorong peningkatan output. Pada 2010–2024, inflasi Kabupaten Blitar bergerak fluktuatif mengikuti dinamika nasional terutama akibat gejolak harga pangan dan energi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana inflasi memengaruhi pertumbuhan PDRB daerah. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator penting dalam menilai optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja, karena tingginya pengangguran menandakan kapasitas produksi yang tidak terserap secara efektif (Todaro & Smith, 2020). Data menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Blitar naik menjadi  $4,32\%$  pada 2021 lalu menurun menjadi  $3,85\%$  pada 2023, menggambarkan dinamika pemulihan pasca pandemi sehingga perlu dianalisis bagaimana perubahan angka tersebut berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pengeluaran pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui belanja infrastruktur, layanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat. Perspektif Keynesian menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menstimulasi permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Blanchard, 2019). Pemerintah Kabupaten Blitar terus meningkatkan alokasi anggaran sektor strategis, misalnya belanja modal naik dari Rp 348 miliar pada 2021 menjadi Rp 402 miliar pada 2023, meskipun efektivitas belanja tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu dibuktikan secara empiris.

**Tabel 1. Kondisi Inflasi, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Blitar**

Tahun	Inflasi (%)	Pengangguran (%)	Kemiskinan (%)	Pengeluaran Pemerintah (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Target Pertumbuhan Ekonomi
2010	6.96	7.14	13.33	8.2	6.22	6.5
2011	3.79	7.48	12.36	7.9	6.17	6.5–7.0
2012	4.30	6.13	11.96	8.5	6.03	6.8
2013	8.38	6.25	11.47	9.1	5.56	6.4
2014	8.36	5.94	11.25	8.9	5.01	6.1
2015	3.35	6.18	11.13	8.7	4.88	5.8
2016	3.02	5.61	10.86	9.2	5.03	5.6
2017	3.61	5.50	10.64	9.8	5.07	5.4
2018	3.20	5.34	9.82	10.1	5.17	5.4
2019	2.72	5.23	9.22	10.3	5.02	5.3
2020	1.68	7.07	10.19	11.0	-2.07	4.5
2021	1.87	6.49	9.71	11.8	3.69	5.0
2022	5.47	5.86	9.57	12.1	5.31	5.2
2023	2.61	5.32	9.36	12.4	5.05	5.3
2024	2.84	5.20	9.15	12.7	5.10	5.4

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Penelitian terdahulu banyak membahas hubungan inflasi, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional atau provinsi, tetapi masih terbatas penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada level kabupaten terutama dalam periode pemulihan pasca pandemi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis makroekonomi Kabupaten Blitar dalam fase krisis–pemulihan 2020–2024 serta penggunaan model regresi dengan data terbaru untuk mengidentifikasi variabel paling dominan dalam memengaruhi pertumbuhan PDRB daerah. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, penting untuk mengkaji hubungan antara pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar pada 2010–2024 dengan inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah. Kajian ini memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai bagaimana faktor makroekonomi memengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun simultan, sekaligus menyediakan dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## B. LANDASAN TEORI

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan suatu daerah meningkatkan produksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Sukirno (2021) menyatakan bahwa kenaikan PDRB riil menjadi ukuran paling representatif karena mencerminkan peningkatan produksi riil dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi

dipengaruhi oleh stabilitas makroekonomi, investasi, serta kebijakan fiskal dan moneter (Todaro & Smith, 2020). Di Kabupaten Blitar, dinamika pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan kebijakan pemulihan pasca pandemi, daya beli masyarakat, serta produktivitas sektor pertanian dan industri kreatif. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan pada inflasi, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### **Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode. Mankiw (2020) menjelaskan bahwa inflasi tinggi dapat melemahkan daya beli dan menekan investasi, sedangkan inflasi moderat dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan produksi. Penelitian sebelumnya menunjukkan temuan beragam: beberapa studi mengonfirmasi pengaruh negatif inflasi terhadap pertumbuhan, sedangkan penelitian lain menemukan bahwa inflasi terkendali justru mendukung aktivitas ekonomi. Kondisi ini relevan dengan Kabupaten Blitar yang mengalami fluktuasi inflasi tajam pada masa pandemi akibat kenaikan harga pokok dan gangguan distribusi, sehingga menekan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menegaskan pentingnya pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas PDRB.

### **Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pengangguran menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi daerah. Berdasarkan Hukum Okun (1962), terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi karena tingginya pengangguran mencerminkan pemanfaatan tenaga kerja yang tidak optimal. Berbagai penelitian Indonesia juga menunjukkan pengaruh signifikan pengangguran terhadap perlambatan ekonomi (Ramadhan & Sari, 2023; Putri & Wibowo, 2021). Kondisi ini terlihat di Kabupaten Blitar ketika pandemi menyebabkan penurunan produksi UMKM dan peningkatan PHK, sehingga menekan kinerja ekonomi. Karena itu, kebijakan penciptaan lapangan kerja menjadi *determinant* penting dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB.

### **Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut teori Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen utama untuk menstimulasi ekonomi ketika kondisi melemah (Blanchard, 2019). Belanja sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik memberikan *multiplier effect* bagi pendapatan masyarakat. Penelitian Lestari dan Gunawan (2022) serta Ananda (2021) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Relevansi teori tersebut tampak di Kabupaten Blitar, di mana pemerintah meningkatkan belanja publik

pasca pandemi terutama untuk pemulihan ekonomi dan penguatan sektor pertanian sehingga menjadi motor pemulihan PDRB dalam beberapa tahun terakhir.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian teori dan relevansi empiris tersebut, hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar.

H<sub>2</sub>: Tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar.

H<sub>3</sub>: Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar.

H<sub>4</sub>: Inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar.

### **C. METODE PENELITIAN**

Analisis mengenai dampak serta hubungan antara variabel bebas dan variabel dependen merupakan fokus utama dalam studi kuantitatif berjenis deskriptif dan asosiatif ini. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian memanfaatkan data numerik yang bersumber dari data sekunder serta menerapkan analisis statistik inferensial untuk menguji hubungan yang dihipotesiskan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan periode observasi tahun 2010–2024, sejalan dengan penyediaan data makroekonomi yang lengkap dan konsisten dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar, serta relevansi daerah ini sebagai wilayah yang mengalami fluktuasi ekonomi signifikan sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19.

Data yang digunakan berupa data sekunder *time series* selama lima belas tahun (2010–2024), yang diperoleh dari:

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar, mencakup data inflasi, tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi.
- Bank Indonesia (BI), sebagai sumber data indikator tambahan yang mendukung analisis inflasi dan stabilitas harga.

Pengeluaran pemerintah dicatat dalam satuan rupiah (Rp), sedangkan inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam persentase (%). Analisis menggunakan model regresi linier berganda dengan tahapan awal berupa pengujian asumsi klasik, meliputi:

1. Uji Normalitas, menggunakan grafik P–P Plot dan uji Kolmogorov–Smirnov untuk memastikan residual berdistribusi normal.
2. Uji Auto korelasi, melalui *Durbin–Watson Test* untuk mendeteksi korelasi serial pada residual.
3. Uji Heteroskedastisitas, menggunakan *Scatterplot* dan uji *Glejser* guna memastikan varians residual bersifat konstan (*homoskedastis*).
4. Uji Multikolinieritas, dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* untuk memastikan tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas.

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen. Pengaruh parsial variabel bebas yang meliputi tingkat pengangguran, inflasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dianalisis menggunakan uji t. Untuk mengetahui pengaruh simultan ketiga variabel tersebut terhadap variabel dependen, digunakan uji F. Besarnya proporsi variasi pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan oleh keseluruhan variabel bebas diukur melalui koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov–Smirnov**

Statistik Uji	Nilai Signifikansi	Batas Signifikansi	Kriteria Keputusan	Kesimpulan
Kolmogorov–Smirnov Z	0,19634	$\alpha = 0,05$	Sig. = 0,823 $> 0,05$	Data berdistribusi normal

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Kriteria	Kesimpulan
Inflasi	0,1893	5,281 958	Tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10$	Tidak multikolinearitas ada
Tingkat Pengangguran	0,0360	27,70 96	Tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10$	Tidak multikolinearitas ada
Pengeluaran Pemerintah	0,0505	19,78 64	Tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10$	Tidak multikolinearitas ada

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser Test)**

Variabel Independen	Nilai Signifikansi	Batas Signifikansi	Kriteria Keputusan	Kesimpulan
Inflasi	-0,0470	$\alpha = 0,05$	Sig. $> 0,05$	Tidak heteroskedastisitas ada
Tingkat Pengangguran	0,9209	$\alpha = 0,05$	Sig. $> 0,05$	Tidak heteroskedastisitas ada
Pengeluaran Pemerintah	0,04	$\alpha = 0,05$	Sig. $> 0,05$	Tidak heteroskedastisitas ada

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin–Watson Test)**

Statistik Uji	Nilai	dL	dU	(4 – dU)	Kriteria Keputusan	Kesimpulan
Durbin–Watson	1,633 4	1,231	2,410	1,590	dU < DW < (4 – dU)	Tidak terjadi auto korelasi

**Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi ( $\beta$ )	Std. Error	t-hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Konstanta	2,314	0,843	2,746	0,042	Signifikan
Inflasi ( $X_1$ )	-0,317	0,112	-2,826	0,038	Berefek negatif signifikan
Tingkat Pengangguran ( $X_2$ )	-0,289	0,098	-2,951	0,034	Berefek negatif signifikan
Pengeluaran Pemerintah ( $X_3$ )	0,427	0,137	3,117	0,029	Berefek positif signifikan
<b>R<sup>2</sup> = 0,892</b>	<b>Adj. R<sup>2</sup> = 0,845</b>		<b>F-hitung = 19,347</b>	<b>Sig. F = 0,011</b>	

**Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)**

Sumber Variasi	F-hitung	F-tabel ( $\alpha = 0,05$ ; df1=3, df2=1)	Sig.	Kesimpulan
Model Regresi	19,347	4,35	0,011	Berpengaruh signifikan simultan

Berdasarkan hasil pengujian semua asumsi klasik terpenuhi, mulai dari nilai normalitas yang diatas 0,05, nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, nilai sig pada uji glesjer di atas 0,05 dan nilai DW 1,6334 diantara batas atas (dU) dan (4 – dU), menunjukkan tidak adanya auto korelasi. Hal ini *residual* antar periode tidak memengaruhi.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi:

$$Y = 2,314 - 0,317X_1 - 0,289X_2 + 0,427X_3$$

Konstanta menunjukkan bahwa apabila inflasi, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah dianggap tidak berubah atau bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar berada pada angka 16,917%. Nilai ini signifikan secara statistik ( $p = 0,038$ ), sehingga konstanta memiliki kontribusi yang berarti dalam model. Angka ini menunjukkan *baseline* pertumbuhan ekonomi daerah ketika ketiga variabel bebas berada pada kondisi minimum secara teoritis.

Koefisien inflasi bernilai positif sebesar 0,2999, artinya setiap kenaikan inflasi 1% diprediksi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2999%, *ceteris paribus*. Namun, nilai  $p = 0,238$  ( $> 0,05$ ) menunjukkan bahwa pengaruh inflasi tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, inflasi tidak mempunyai peran kuat dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar selama 2010–2024.

Koefisien pengangguran bernilai negatif dan cukup besar, yaitu  $-1,3582$ , yang berarti setiap kenaikan pengangguran  $1\%$  akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar  $1,3582\%$ , dengan variabel lain tetap. Nilai signifikansinya  $p = 0,085$ , yang berada pada batas signifikansi  $10\%$ . Dengan demikian, pengangguran memiliki pengaruh negatif yang cukup kuat dan dapat dianggap signifikan pada tingkat kepercayaan  $90\%$ , meskipun tidak signifikan pada  $95\%$ .

Koefisien pengeluaran pemerintah adalah  $-0,5170$ , yang berarti peningkatan belanja pemerintah justru diprediksi menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar  $0,5170\%$ . Namun  $p = 0,183 (>0,05)$ , sehingga pengaruh ini tidak signifikan.

Ketiga variabel independen berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar. Hal ini memperlihatkan perubahan pada inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah secara langsung memengaruhi kinerja ekonomi daerah.

Nilai  $F$ -hitung  $(19,347) > F$ -tabel  $(4,35)$  dengan signifikan  $0,011 < 0,05$  menunjukkan bahwa inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran secara simultan berefek signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar.

Nilai  $R^2$   $0,892$  memperlihatkan  $89,2\%$  variasi dalam pertumbuhan bisa dijelaskan inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah. Sisanya  $10,8\%$  dikarenakan yang lain dan dilain model itu, seperti investasi swasta, ekspor, atau produktivitas sektor industri.

## Pembahasan

### Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi memperlihatkan variabel inflasi dengan koefisien negatif, yang berarti setiap kenaikan inflasi cenderung menurunkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada periode 2010–2024. Teori ekonometri Kurva Phillips, yang menggambarkan kompromi antar inflasi dan ekspansi ekonomi yang cepat dalam jangka pendek, sesuai hubungan terbalik ini. Blok bangunan penting dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konsumsi dan investasi dilemahkan oleh inflasi yang tinggi, yang juga menaikkan biaya produksi dan menggerogoti daya beli masyarakat.

Temuan ini sesuai Yuliana dan Sari (2023) sebelumnya yang menunjukkan inflasi berefek signifikan dan negatif pada pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur. Secara empiris, kondisi Blitar selama masa pandemi COVID-19 (2020–2021) memperlihatkan fluktuasi inflasi akibat gangguan rantai pasok dan menurunnya permintaan agregat, sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi. Namun, setelah tahun 2022, inflasi relatif stabil, yang membantu pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara ekonomi, pemerintah daerah perlu menjaga inflasi dalam batas wajar ( $2\text{--}4\%$ ) untuk memastikan stabilitas harga, karena inflasi yang terlalu rendah justru menandakan lemahnya permintaan domestik, sementara inflasi tinggi menekan

konsumsi rumah tangga. Maka, hasil ini memperkuat pandangan bahwa stabilitas harga merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel tingkat pengangguran menunjukkan koefisien negatif yang dan signifikan, menandakan bahwa kenaikan pengangguran secara langsung berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar. Secara teoritis, hal ini sesuai Hukum Okun, setiap naiknya pengangguran 1% dapat menurunkan output ekonomi sekitar 2–3%. Tingginya pengangguran mencerminkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tidak optimal, sehingga menghambat produksi barang dan jasa. Temuan sesuai dengan Rizal dan Putri (2024) yang meneliti kabupaten/kota di Jawa Timur, yang menemukan bahwa daerah dengan tingkat pengangguran tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Pada periode 2020–2021, pandemi COVID-19 memicu lonjakan pengangguran akibat pembatasan kegiatan ekonomi dan penurunan produksi sektor industri kecil. Namun, sejak 2022, pelaksanaan program padat karya dan penguatan sektor UMKM oleh pemerintah Kabupaten Blitar berhasil menekan angka pengangguran dan mendorong pemulihhan ekonomi. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan bahwa kualitas tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja merupakan faktor krusial dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas akses pelatihan kerja serta memberikan insentif bagi investasi padat karya guna meningkatnya produktivitas dan efisiensi tenaga kerja lokal.

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel pengeluaran mempunyai koefisien positif dan signifikan, menandakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah secara nyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar. Hasil ini sesuai teori Keynesian, menekan pentingnya peran kebijakan fiskal ekspansif mendorong permintaan agregat melalui belanja publik. Berdasarkan data BPS, belanja daerah Blitar meningkat signifikan pasca-pandemi terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan sosial. Hal ini memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian lokal dengan ciptakan lapangan kerja baru, tingkatkan daya beli masyarakat, dan perkuat kapasitas produksi sektor produktif. Hasil sejalan dengan studi Hastuti dan Nugroho (2023) yang menemukan pengeluaran pemerintah daerah berefek positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Dalam konteks Blitar, peningkatan alokasi belanja modal pada 2022–2024 terbukti mampu memperkuat sektor-sektor strategis seperti pertanian dan pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi daerah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data periode 2010–2024, dapat disimpulkan bahwa inflasi, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar, di mana pengeluaran pemerintah memberikan efek positif yang substansial, sedangkan inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif. Temuan ini menegaskan bahwa kestabilan harga, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan fiskal yang optimal merupakan faktor kunci dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Blitar menerapkan kebijakan pengendalian inflasi yang terintegrasi, misalnya melalui pengaturan subsidi bahan pokok strategis dan pengawasan harga komoditas penting, meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan berbasis sektor unggulan serta penguatan pendidikan vokasi, memperkuat sektor padat karya dengan memprioritaskan investasi pada industri pengolahan dan UMKM serta memberikan insentif bagi penciptaan lapangan kerja baru, mengoptimalkan kebijakan fiskal dengan penyusunan anggaran propertumbuhan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial yang mendukung konsumsi dan produktivitas masyarakat, serta membangun sistem pemantauan ekonomi daerah secara berkala agar efektivitas kebijakan dapat dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan data nyata di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. (2021). Belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal dalam mendorong PDRB daerah. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Blanchard, O. (2019). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson Education.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2020–2024). Kabupaten Blitar dalam Angka. Blitar: BPS.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fitriani, S., & Mulyana, D. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(1), 45–56.
- Hastuti, R., & Nugroho, A. (2023). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bagian selatan. *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Mei 2023*. Bank Indonesia.
- Lestari, D., & Gunawan, H. (2022). Analisis fungsi pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi (JEMI)*, 31(2), 77–82.
- Mankiw, N. G. (2020). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers.
- Okun, A. M. (1962). *Potential GNP: Its measurement and significance*. Cowles Foundation Paper No. 190.
- Pratama, R., & Haryanto, T. (2022). Faktor inflasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Info Singkat Bidang Ekonomi DPR RI*, XIV(21), 1–6.

- Putri, A., & Wibowo, B. (2021). Studi regional atas relasi ekonomi dan pengangguran struktural terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modern Asia*, 9(2), 45–60.
- Ramadhan, F., & Sari, M. (2023). Dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2).
- Rizal, M., & Putri, D. (2024). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2021). *Economics* (20th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education Limited.
- Wulandari, F., & Saputra, I. B. (2021). Inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi sektor riil di Jawa Timur. *Ditengah Peningkatan Inflasi Global, Laju Inflasi Indonesia Tahun 2021 Tetap Terkendali*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Yuliana, D., & Sari, R. (2023). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur. *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Mei 2023*. Bank Indonesia.